

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* DIDESA LANDUNGSARI, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

SKRIPSI



Oleh:

SUSANA KAKA

NIM 2016120174

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

PENGELOLAAN KEUNGAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Susana Kaka¹⁾, Elly Lestari S.E.,MSM²⁾, Warter Agustim,S.E.,MM³⁾
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
E-mail : susanakaka238@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa yang efisien dibuktikan dari adanya *good governance* yang akuntabilitas, transparansi dan partisipasif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa atas alokasi dana desa dilihat dari sudut pandang *Good Governance* mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipasif yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Landungsari Malang. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan Kantor Desa Landungsari periode 2018 - 2020. Metode analisa data yang di gunakan yaitu deskriptif dengan cara pengumpulan data, penyajian data, redukasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan dana desa untuk meningkatkan *good governance* di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dinyatakan kurang efisien karena tahun 2019 pengeluaran melebihi Alokasi Dana Desa (ADD) yang di anggarkan dan tahun 2020 pengeluaran lebih sedikit dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan. Gambaran *Good Governance* pada kantor Desa Landungsari Malang berdasarkan aspek akuntabilitas dinyatakan masih tidak akuntabilitas karena penyajian laporan keuangan tidak lengkap, aspek transparansi diketahui kantor desa kurang transparan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan aspek partisipasif terhadap pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Good Governance, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 mengenai desa yang tertera melalui nomor 6 tahun 2014 menjadi kabar gembira untuk desa di Indonesia. Undang-undang yang telah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 7 tahun didalamnya membahas tentang pendanaan untuk semua desa yakni 73 1000 yang mendapatkan berbagai macam sumbangan baik dari pusat maupun daerah. Yang dijelaskan bahwa semua desa mendapatkan dana mencapai miliaran rupiah yang dianggarkan untuk kebutuhan desa. Harus dibuat melalui peraturan agar melalui kebijakan yang ada pemerintah desa bisa mematuhi dan menjalankan program dengan baik dan benar ataupun penggunaan anggaran negara maupun desa karena jumlahnya sangat berlipat ganda, jauh dari jumlah yang terealisasi. Biaya yang mencapai 1 miliar belum tentu bisa membiayai semua kegiatan yang ada di desa maka dari itu banyak kegiatan yang ditunda di tahun berikutnya karena kurangnya dana yang masuk ke desa. mulai dari tahun 2015 ada penambahan dana desa yang turun pada setiap desa yang membutuhkan yakni uang tersebut melalui kabupaten, tanpa dipotong. Hal ini menunjukkan, banyak aparat desa yang belum berani mengambil resiko untuk memanfaatkan dana yang menjadi khas desa. Hal ini karena tidak jelas kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah untuk menggunakan dana tersebut. (Kompas, 2015).

Kenyataannya pendapatan yang bersumber dari luar sangat banyak. Selain penerimaan yang diperoleh dari hibah dana desa, juga memperoleh dari alokasi dana desa dengan nilai 10% dari APBD dari pihak kabupaten atau kota dalam artian dana bagi hasil dari penerimaan pajak. Desa memiliki dua jalur bantuan yakni dari provinsi dan kabupaten. Pendapatan desa dari pendapatan asli desa yakni dari hasil usaha, hasil aset dan lain-lain yang tidak dapat diikat

dengan pendapatan dari berbagai pihak lain atau pihak ketiga yang sah. Hal ini mendorong agar aparat desa ataupun pemerintahan desa mengerti peraturan mengenai pengelolaan keuangan yang merupakan pendukung salah satu komponen good governance. sekarang ini dalam hal manajemen pembangunan good governance merupakan paradigma yang paling penting dalam membangun sebuah desa (Kemendagri,2016) pemikiran yang semakin berkembang tentang good governance dalam sektor pemerintahan menjadi salah satu pendukung dalam dunia politik menuju ke arah yang baik dan berdemokrasi.

dalam mendukung majunya sebuah desa pembangunan yang merata sangat dibutuhkan oleh masyarakat, melalui daerah penyangga dan daerah yang sudah maju. Agar saling membantu pemerataan sebuah desa harus adanya keselarasan antara daerah penyangga harus bekerjasama dengan daerah perkotaan karena potensi dari setiap daerah berbeda-beda hal inilah yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk menggali potensi dari setiap daerah harus adanya pemerataan agar bisa membuat perencanaan di masa yang akan datang. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas peneliti ingin memberikan informasi tentang UMKM yang tersebar di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, karena memiliki karakteristik yang khas pada daerah penyangga yang bersinergi dengan perkotaan di sekitarnya. Untuk melakukan kajian ini peneliti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak UMKM belum bisa melakukan manajemen keuangan dengan baik karena masih memiliki laporan usahayang sangat sederhana hal ini bisa menyebabkan banyak usaha yang tidak berkembang karena perhitungan dalam keuangan masih sangat minim. Adapun faktor penghambat yang bisa mempengaruhi lambatnya sebuah usaha yakni kurangnya pemahaman bagi pelaku usaha terutama rendahnya pendidikan serta mental dan lingkungan yang tidak

mendukung. Dengan adanya hambatan ini maka harus adanya perbaikan atau pembenahan agar bisa meningkatkan program yang berkaitan dengan UMKM dan hal yang paling terpenting pemerintah terjun langsung bersama masyarakat agar bisa menentukan semuanya (W Agustim, 2016)

1.2 Rumusan Masalah

bagaimanakah proses pengelolaan dana desa atas alokasi dana desa jika dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang terdapat pada *Good Governance*

1.3 Tujuan Penelitian

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai proses pengelolaan dana desa atas alokasi dana desa dilihat dari sudut pandang *Good Governance* mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Landung sari.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi penelitian ini sangat memberikan manfaat karena memiliki gambaran dalam bidang pelaksanaan, pengawasan serta pelayanan yang dilakukan dengan tanggung jawab agar bisa memperoleh akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana desa yang valid khususnya di Desa Landung sari, Kecamatan Dau.

1. Penelitian ini dilakukan sangat bermanfaat bagi peneliti sendiri karena dapat menambah wawasan sesuai dengan permasalahan yang ada yakni sesuai dengan pengelolaan dana desa.
2. Bagi Pemerintah Desa Landungsari sebagai evaluasi agar bisa memperoleh kegiatan dan melakukan pengelolaan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan dan Yunita Anggraini. 2011. Anggaran Bisnis (Edisi kedua). Yogyakarta; UPP STIM YKPN
- Agus Subroto 2009 “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung”
- Agustinus Hermino, (2014), Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter, Bandung:
Alfabeta.
- Andi Prastowo.(2010). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan.
- Aldrige, E. Jhon dan Sutojo, Siswanto. 2015. Good governance :Tata kelola perusahaan yang sehat, Jakarta: Damar media pustaka
- Astuti T.P., & Yulianto. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (2016): 1-14*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta.
- Cl Gunawan, A Mukoffi, S Sumarno, Y Sulistyowati – Referensi.2018. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi volume:6 no.1
- Creswell, John W.2015. penelitian kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara lima pendekatan.Yogyakarta: Pustaka pelaja Adi Irawan, Analisis, pengaruh daya tarik wisata, persepsi Harga, dan kualitas
- Fattah, Nanang, 2009, Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hartati, Sri. 2013. Manajemen Keuangan Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. www.api-pwu.com/wpcontent/uploads/2013/01/Artikel-Sri-Hartati.pdf
- Hutapea H.D., & Aysa. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting

Kabupaten Tapanuli Utara). *Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi Volume: 6 No. 1*

- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Irma, 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Jurnal.Universitas Tadulako.
- Intriandoro,Nur, dan Bambang Supomo,1999, Metode penelitian dan Bisnis, Yogya karta :BPFE Yogyakarta
- Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Lexy J.(2007) metodologi Penelitian kualitatif, penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandungelitan Jogjakarta: Ar-Ruzz Media pemerintah Desa dikabupaten Dongggala.ISSN 2302-2019. E-Jurnal Katalogis. Volume 3.Nomor 1 .Hal 43-53.
- Kaihatu, T. S. 2016. Good Corporate Governance dan penerapannya diindonesia. Jurnal
- Sjahrudin Rasul, 2000. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja, Jakarta.
- Kuswadi (2005). Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Biaya. Jakarta: PT. Elex. Media Komputindo.
- Lukviarman, Niki.2016. Corporate governance. Solo:PT Era Adicitra Intemediano.20) Sonny Sumarsono.2020. Manajemen Keuangan pemerintahan.Yogjakarta: Graha Ilmu
- Marvanti. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 6, Nomor 2, Februari 2017
- Muri Yusuf.2014. “Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan” Jakarta:prenadamedia group.
- Mastuti, R.2016.Metabolit Sekunder dan pertahanan Tumbuhan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam universitas Brawija.
- Sugiyono.2020. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan RND dan .Bandung:menejemen dan kewirausahaan, vol 8,no.1,h.1-9
- Sutedi, Adrian.2011. Good corporate Governance. Edisi pertama. Jakarta:Sinar Grafika
- Sugiyono. 2013.Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D.Bandung:Alfabeta

Sulumin, Hasan Husin. 2015. Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Marvanti, Iga Vidya dan Sugeng Pratoyo .Februari 2017.Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan .Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.(Vol.6.)

Sumarsono,Sonny.2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan.Yogyakarta:Graha Ilmu

Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi* 17 (01).

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014

Umi Narimawati.2008. Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, Teori dan Aplikasi Bangunan:Agung Media.

Wahjono, Sentot Imam. (2010). Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

W Agustim - BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF, 2016

